

Progress Report and Hasil Awal Temuan Lapangan

November - Desember 2020

Developing Lesson Learned Documentation on Tenurial Conflict Handling and Practical Participatory Rezoning Guidance Based on Lesson Learned From the Field

Pengembangan Dokumen Pembelajaran Terhadap Penanganan Konflik Tenurial dan Panduan Praktik Rezonasi Partisipatif Berbasis Pembelajaran Dari Lapangan

1. Konteks

Dalam rangka penyadartahuan dan saling berbagi informasi, BIJAK mendokumentasikan pembelajaran dari penanganan konflik tenurial melalui kemitraan konservasi dan rezonasi, termasuk tantangan, kemajuan, dan kisah sukses di kawasan konservasi. 4 UPT yang telah dipilih adalah: Balai TN Bukit Baka Bukit Raya, Balai TN Gunung Rinjani, Balai TN Meru Betiri dan Balai TN Sebangau.

Dokumen pembelajaran akan digunakan untuk menyempurnakan pedoman konflik tenurial. Dokumen tersebut juga akan memberikan bukti yang meyakinkan kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia bahwa kemitraan konservasi, rezonasi, dan penegakan hukum ditambah dengan pemberdayaan ekonomi merupakan pilihan yang layak untuk menyelesaikan konflik tenurial.

Selain itu, BIJAK juga akan mendokumentasikan pembelajaran dari rezonasi partisipatif di TN Sebangau. Pedoman untuk rezonasi partisipatif akan dilengkapi dengan mengumpulkan pengalaman zonasi dan pembatasan terkini di TN Bukit Duabelas di Jambi, dan TN Lore Lindu, Sulawesi Tengah. BIJAK akan mengembangkan pedoman langkah demi langkah praktis berbasis lapangan bagi UPT untuk melaksanakan zonasi dan pembatasan partisipatif. Dokumen ini diharapkan dapat mempromosikan pendekatan tersebut secara nasional.

2. Tujuan

1. Mengembangkan pembelajaran penanganan konflik tenurial melalui kemitraan konservasi, rezonasi partisipatif dan penegakan hukum ditambah dengan pemberdayaan ekonomi dari 4 UPT dalam pemutakhiran pedoman penanganan konflik tenurial.
2. Untuk mengembangkan pembelajaran dari rezonasi partisipatif TN Sebangau, TN Bukit Duabelas, dan TN Lore Lindu
3. Mengembangkan pedoman praktis penanganan konflik tenurial berdasarkan pembelajaran dari 4 UPT.
4. Untuk mengembangkan pedoman rezonasi partisipatif praktis berdasarkan pelajaran dari UPT.

3. Topik Kajian

Topik kajian menasar: 1) Pembelajaran Penanganan Konflik Tenurial Melalui Kemitraan Konservasi, Rezonasi, Penegakan Hukum yang dikombinasikan dengan Penguatan Ekonomi, 2) Pembelajaran Rezonasi Partisipatif di Taman Nasional Sebangau, Taman Nasional Bukit Duabelas dan Taman Nasional Lore

Lindu, 3) panduan praktis Rezonasi Partisipatif berbasis pembelajaran dari UPT, dan 4) panduan praktis penanganan konflik tenurial berbasis pembelajaran dari UPT.

Tabel di bawah ini menjelaskan tentang lokasi (6 Taman Nasional) dan persoalan yang akan dikaji di masing-masing lokasi:

| Nama Taman Nasional | Kajian |
|--------------------------|--|
| TN Bukit Baka Bukit Raya | Penanganan Konflik Tenurial dan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat Penegakan hukum |
| TN Sebangau | Penanganan konflik tenurial melalui Kemitraan Konservasi Penanganan konflik tenurial melalui rezonasi partisipatif |
| TN Lore Lindu | Penanganan konflik tenurial melalui Rezonasi Partisipatif |
| TN Bukit Duabelas | Penanganan konflik tenurial melalui Rezonasi Partisipatif |
| TN Gunung Rinjani | Penanganan konflik tenurial melalui Kemitraan Konservasi Pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat |
| TN Meru Betiri | Penanganan konflik tenurial melalui Kemitraan Konservasi Pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat |

4. Tahapan

Rencana Tahapan kegiatan kajian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

| Tahapan | Lokasi dan Waktu | Informan | Hasil |
|-----------------------------------|---|---|---|
| Persiapan | Pekanbaru, Batam (26 November 2020) | Konsultan, USAID BIJAK | Dokumen persiapan: jadwal, logistic, pembagian tim, dll |
| Studi Meja | Pekanbaru, Batam (27, 29-30 November dan 1-3 Desember 2020) | Konsultan | TOR, termasuk metodologi |
| Studi Lapangan | | | |
| 1. Observasi | TN Sebangau, TN Gunung Rinjani dan TN Lore Lindu (4-13 Desember 2020) | | Catatan lapangan, foto, rekaman video, dan atau rekaman wawancara singkat |
| | TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Meru Betiri, TN Bukit Duabelas (14-23 Desember 2020) | | |
| 2. Wawancara | TN Sebangau, TN Gunung Rinjani dan TN Lore Lindu (4-13 Desember 2020) | Minimal 10 orang terdiri dari: 2 orang staf TN, 2 orang Pemdes, 2 orang representasi kelompok masyarakat, 2 orang perwakilan masyarakat sipil dan 2 orang dari pemerintah kabupaten / kota / provinsi | Rekaman wawancara, transkrip wawancara, foto dan atau rekaman video wawancara |
| | TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Meru Betiri, TN Bukit Duabelas (14-23 Desember 2020) | | |
| 3. FGD | TN Sebangau, TN Gunung Rinjani dan TN Lore Lindu (4-13 Desember 2020) | Minimal dilakukan 3 kali: a. 2 kali di level desa dengan melibatkan: pemerintah desa, perwakilan kelompok masyarakat | Rekaman FGD, notulensi FGD, foto dan atau rekaman video FGD |
| | TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Meru Betiri, TN Bukit Duabelas (14-23 Desember 2020) | b. 1 kali di level TN dengan melibatkan Balai TN | |
| Pengembangan Draf Dokumen 1 dan 2 | Pekanbaru, Batam (2-17 Januari 2021) | Konsultan | Draf 1 dokumen 1 dan 2 |
| Penyempurnaan Dokumen 1 dan 2 | Pekanbaru, Batam (18-31 Januari dan 1-3 Februari 2021) | Konsultan, Tim USAID BIJAK | Draf 2 dokumen 1 dan 2 |

| | | | |
|--|--|--|-----------------------|
| Diskusi Masukan terhadap Dokumen 1 dan 2 | Jakarta (9-12 Februari 2021) | Konsultan, Tim USAID BIJAK, KSDAE, UPT | Catatan diskusi, foto |
| Finalisasi Dokumen 1 dan 2 | Pekanbaru, Batam (15-28 Februari 2021) | Konsultan | Draf akhir 1 dan 2 |
| Proof read dokumen 1 dan 2 | Pekanbaru, Batam, Jakarta (5-15 Maret 2021) | Konsultan, Tim USAID BIJAK | Dokumen 1 dan 2 |
| Pengembangan Dokumen 3 dan 4 | Pekanbaru, Batam, Jakarta (17-31 Maret 2021) | Konsultan | Dokumen 3 dan 4 |
| Lokakarya Nasional Peluncuran Dokumen Pembelajaran | Jakarta (31 Maret – 2 April 2021) | Konsultan, Tim USAID BIJAK, KSDAE, UPT dan para pihak yang relevan | N/A |

5. Progress

Sepanjang bulan November hingga Desember 2020 telah dilakukan kegiatan berdasar tabel di bawah ini:

| Tahapan | Lokasi dan Waktu | Waktu | Hari Kerja | Hasil |
|--|--|--|------------|---|
| Persiapan | Pekanbaru, Batam, Jakarta | 26 November 2020 | 1 | Dokumen persiapan: jadwal, logistic, kontrak, pembagian tim, dll |
| Studi Meja | Pekanbaru, Batam | 27, 29-30 November dan 1-3 Desember 2020 | 6 | TOR, termasuk metodologi |
| Studi Lapangan (termasuk observasi lapangan, wawancara mendalam dan FGD) | TN Bukit Baka Bukit Raya, TN Meru Betiri, TN Bukit Duabelas, TN Sebangau, TN Gunung Rinjani, TN Lore Lindu | 4-23 Desember 2020 | 16 | Catatan lapangan, foto, rekaman video, notulensi FGD dan atau rekaman wawancara |

Pengembangan Dokumen Pembelajaran Terhadap Penanganan Konflik Tenurial

5.1. Catatan Studi Lapangan di Taman Nasional Gunung Rinjani

- Konflik tenurial yang cukup mengemuka terjadi di blok Hutan Pesugulan Desa Bedidas, Lombok Timur. Konflik ini melibatkan aktor-aktor lokal yang memiliki hubungan kuat dengan kepentingan politik praktis di level kabupaten. Konflik bermula ketika sebagian masyarakat Desa Bedidas (10%) terprovokasi melakukan okupasi lahan di Blok Hutan Pesugulan tahun 2015. Pihak Balai TNGR menyebut pengarapan lahan ini sebagai Pemanfaatan kawasan Tanpa Izin (PKTI). Para pelaku PKTI mengklaim kawasan hutan Pesugulan sebagai kawasan adat yang ditandai dengan adanya makam para pendahulu mereka (di kemudian hari terbukti, makam tersebut adalah makam rekayasa untuk memperkuat klaim penguasaan atas lahan. Namun dibalik itu semua, jual beli lahan tak dapat dihindarkan. Lahan yang telah dikuasai elit, dijual kepada masyarakat yang berani membayar.
- Sejak 2015, Balai TNGR melakukan beberapa kali represi penegakan hukum, namun terkendala karena pelaku PKTI melakukan perlawanan dengan menggunakan perempuan dan anak di baris depan. Balai TNGR juga terus melakukan sosialisasi dan imbauan. Balai TNGR menyerukan soal pelanggaran aturan dan perambahan yang akan memengaruhi keadaan ekosistem. Balai TNGR juga meminta Pemerintah Daerah turut melakukan mediasi agar para

pihak mau duduk bersama sembari melakukan pemberdayaan masyarakat. Pada 2019 PKTI Pesugulan teratasi seiring dengan selesainya konflik di kawasan wisata Joben.

- Joben sendiri merupakan kawasan wisata yang sudah 20 tahun belakangan dikuasai Pemda Lombok Timur. Pemda memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengelola lokasi wisata. Tujuannya adalah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lokasi kawasan wisata Joben berbatasan langsung dengan TNGR. Pengelola wisata memasukkan kawasan TNGR sebagai destinasi wisata dengan mengantongi izin dari Kementerian LHK. Konflik antara Pemda Lombok Timur dengan Balai TNGR terus terjadi, tidak ada kesepahaman antara kedua belah pihak. Namun konflik ini justru menguntungkan Pengelola kawasan Wisata. Hal ini menyadarkan kedua belah pihak, bahwa komunikasi yang terbangun selama ini memang sudah keliru. Pemda Lombok Timur dan Balai TNGR selama ini hanya berkuat pada kepentingan masing-masing. Hal ini dilandasi karena masing-masing pihak memiliki tugas dan kewajiban sendiri-sendiri, tanpa melihat poin apa yang dapat mempersatukan kepentingan tersebut.
- Pemda Lombok Timur dan Balai TNGR akhirnya melihat kepentingan yang justru dapat menguntungkan kedua belah pihak. Satu sisi, pengelolaan wisata secara bersama-sama dapat meningkatkan PAD. Sementara di sisi lain, pengelolaan tersebut juga sekaligus mempertahankan fungsi kawasan Taman Nasional, berikut dengan pendapatan negara berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dari kesepahaman ini, disusun MoU antara kedua belah pihak. Turunnya tensi konflik di Joben turut memengaruhi penyelesaian konflik di Hutan Pesugulan, dimana Pemda Lombok Timur turut serta menyelesaikan persoalan di lapangan.
- Para pihak memberikan keterangan yang nyaris sama dalam setiap wawancara dan FGD. Hal ini mengindikasikan bahwa konflik tersebut diselesaikan hingga tuntas.
- Kini, kawasan Hutan Pesugulan dijadikan sebagai areal pemulihan ekosistem melalui skema kemitraan Konservasi. Balai TNGR juga melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa Bedidas melalui berbagai kegiatan, termasuk: pengembangan hidroponik, penangkaran rusa, pengembangan produk tani lokal dan kegiatan penyuluhan lainnya.
- Sementara itu, kawasan wisata Joben dikelola bersama oleh Pemda Lombok Timur dan Balai TNGR. Sembari menunggu MoU direview oleh KLHK, Pemda Lombok Timur tetap mengelola sebagian kawasan yang berada di luar areal Taman nasional dan Balai TNGR mendukung Kelompok Masyarakat Joben Eco Park (JEP) untuk mengelola wisata di dalam kawasan Taman Nasional.

5.2. Catatan Studi Lapangan di Taman Nasional Meru Betiri

- Konflik perambahan sudah dimulai sejak lama di kawasan Taman Nasional Meru Betiri. Hal ini dipicu dengan keberadaan pohon jati milik Perhutani. Pada 1965, perambahan jati pertama terjadi. Perambahan terus dilakukan hingga puncaknya di masa pemerintahan Presiden Gus Dur, dimulai sejak 1999. Hingga saat ini, pencurian jati terus terjadi.
- Konflik antara Balai TNMB dengan masyarakat memuncak ketika terjadi razia besar-besaran yang dilakukan Balai TNMB. Dalam razia tahun 2019, seorang warga meninggal dunia, tertembak oleh senjata petugas. Konflik ini meruncing disertai dengan semakin banyaknya jati yang dicuri dari dalam kawasan taman. Oknum dari Kepolisian disinyalir menjadi aktor utama dalam pencurian jati ini. Sebagian masyarakat yang terlibat mencuri jati berbalik arah, mereka kini giat menanam kawasan TN yang telah gundul.
- Sebagian lahan yang telah kritis dikuasai oleh masyarakat pedesaan hingga hari ini. Berbagai upaya dilakukan untuk pemulihan ekosistem. Pilihan kemitraan konservasi menjawab kebutuhan tersebut.

5.3. Catatan Studi Lapangan di Taman Nasional Sebangau

- Konflik tenurial di Kelurahan Habaring Hurung masih terjadi hingga hari ini. konflik ini melibatkan pihak Balai Taman Nasional Sebangau, Ormas yang mengatas-namakan kelompok Adat, dan Masyarakat Eks Transmigrasi Kelurahan Habaring Hurung. Objek yang menjadi area konflik ini merupakan LU 2 (Lahan Usaha 2) jatah masyarakat transmigrasi yang saat ini masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Sebangau. Hal ini memicu reaksi masyarakat Habaring Hurung yang merasa bahwa LU 2 adalah hak mereka yang diberikan oleh negara sebagai warga transmigrasi.
- Upaya Rezonasi Kawasan di Taman Nasional Sebangau masih berproses. Khusus Kelurahan Habaring Hurung Kecamatan Bukit Batu, kegiatan ini dilakukan oleh fasilitator LATIN dengan berkoordinasi bersama tim Balai Taman Nasional Sebangau Resort Habaring Hurung.
- Kawasan Taman Nasional Sebangau ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan dengan Nomor SK.423/Kpts-II/2004. Hingga saat ini, wilayah Kelurahan Habaring Hurung mengalami beberapa kali keputusan. Keputusan tersebut diantaranya memasukkan Lahan Usaha 2 milik masyarakat masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Sebangau, lalu memasukkan wilayah Kelurahan Habaring Hurung secara keseluruhan masuk ke dalam kawasan taman nasional sebangau. Keputusan terakhir ini yang memicu sentimen masyarakat dengan keberadaan teman-teman Balai TN Sebangau Resort Habaring Hurung.
- Di sisi lain, program pemberdayaan melalui penguatan ekonomi masyarakat menjadi opsi yang paling efektif dilakukan oleh Balai TN Sebangau di Kelurahan Kereng Bangkirai. Melalui pengembangan program ekowisata, Kelurahan Kereng Bangkirai yang terletak di Kawasan Penyangga TN Sebangau berhasil meningkatkan sumber ekonomi masyarakat dan menjadi salah satu ikon wisata andalan Kota Palangkaraya.
- Sejak ditetapkan keputusan Kawasan TN Sebangau oleh Menteri Kehutanan, Balai TN Sebangau melalui SPTN wilayah I mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meninggalkan aktifitas ilegal logging.
- Terdapat lima wilayah yang berpotensi untuk dikembangkan; 1.) Centre For International Cooperation in Sustainable Management of Tropical Peatland (CIMTROP), yaitu laboratorium alam hutan gambut yang saat ini dikelola oleh Universitas Palangkaraya. area ini terbentang di daerah sungai koran, rasau, dan mangkok. 2.) wilayah danau Pangen-Panggalas. 3.) Mendawai-Bukit kaki cinta birahi. 4.) Wisata susur sungai. 5.) wisata ekosistem lahan gambut.
- Saat ini juga sudah terbentuk kelompok Getek dan Kelompok Nelayan tradisional sebagai kelompok dampingan dari SPTN Wilayah I Balai TN Sebangau. Setelah terbentuknya dua kelompok tersebut, pihak Balai TN Sebangau bersama pihak Kelurahan dan beberapa tokoh masyarakat juga bersama sama menggandeng beberapa pihak untuk memajukan Kawasan Wisata Kereng Bangkirai. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Dinas Pariwisata saat ini menjadikan kawasan wisata kereng bangkirai sebagai salah satu destinasi unggulan kota palangkaraya. sebagai bentuk dukungan pemerintah, melalui dinas pariwisata kota sudah membangun sarana penunjang wisata seperti pelabuhan getek, tribun penonton, food court, spot foto, pendopo pengunjung, dan gerai oleh-oleh bagi pengunjung. Balai TN Sebangau bersama para pihak juga terus bersinergi dengan memberi bantuan serta pelatihan kepemanduan wisata secara berkala bagi setiap kelompok yang ada.

5.4. Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya

- Opsi penegakan hukum terkait aktifitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) didalam kawasan TNBBBR masih terus dilakukan hingga saat ini. Namun kendala operasional tim patroli dari pihak TNBBBR juga menjadi salah satu faktor pihak Balai masih saja kecolongan. Hal ini menginisiasi Balai TNBBBR untuk membentuk MMP (masyarakat mitra polhut),

dimana masyarakat terlibat untuk melakukan komunikasi dan patroli di dalam kawasan TNBBBR.

- Disisi lain proses penegakan hukum juga menimbulkan masalah jika masuk ke meja hijau. karena seluruh proses biaya ditanggung oleh pihak TNBBBR. Oleh sebab itu, upaya persuasif terus dilakukan, dengan cara meminimalisir kasus untuk dilanjutkan ke meja hijau. saat ini hanya tersisa sekitar 6 orang warga Desa Rantau Malam yang melakukan aktifitas PETI, namun masih banyak yang ikut bekerja dengan pengusaha PETI dari luar desa Rantau Malam. Bahkan masih banyak anak muda dari Desa Rantau Malam yang berprofesi sebagai pengantar logistik untuk aktifitas PETI di dalam kawasan TNBBBR.
- Masyarakat Desa Rantau Malam sangat menyambut baik upaya pemberdayaan masyarakat melalui Ekowisata dan Kelompok Tani Hutan. Pada umumnya masyarakat siap untuk meninggalkan aktifitas PETI jika ada alternatif sumber ekonomi lain. Karena menurut pengakuan beberapa tokoh kunci, hasil dari PETI juga belum bisa memenuhi kebutuhan keluarga. mereka melakukan itu karena terpaksa.
- Saat ini sudah terdapat kelompok ekowisata yang didalamnya terdapat lagi sub kelompok seperti Kelompok Transportasi dari serawai ke Desa Rantau Malam, kelompok Homestay yang dikelola oleh kelompok ibu-ibu, kelompok porter untuk wisata pendakian bukit raya, dan kelompok kerajinan. Selain itu juga, baru saja terbentuk Kelompok Tani Hutan untuk budidaya madu kelulut. Dari hasil observasi bersama anggota kelompok, memang banyak sekali potensi madu kelulut di kawasan TNBBBR dan sekitarnya.
- Kendala yang saat ini dihadapi adalah penguatan kapasitas kelembagaan kelompok dan pelatihan teknik budidaya kelulut.

Panduan Praktik Rezonasi Partisipatif Berbasis Pembelajaran Dari Lapangan

5.5. Catatan Studi Lapangan di Taman Nasional Lore Lindu

- Pada masa lalu, eskalasi konflik di TNLL cukup tinggi salah satunya mengakibatkan lepasnya Dongi Dongi dari kawasan TNLL. Saat ini telah terjadi de-eskalasi konflik tenurial di TNLL. De-eskalasi konflik terjadi karena dampak dari komunikasi yang sudah terjalin atas ruang-ruang pemanfaatan tradisional masyarakat. Akar konflik yang terjadi di TNLL dapat di klasifikasikan dalam 3 bentuk, yaitu: Pertama, di daerah Kulawi Selatan. Konflik yang terjadi merupakan pertentangan penguasaan berdasarkan klaim adat. Kedua, di daerah Napu dan Palolo, dimana konflik yang terjadi merupakan pertentangan penguasaan berdasarkan klaim atas perluasan tanah garapan dari warga ex transmigrasi lokal. Dan, ketiga di daerah Kulawi, dimana konflik yang terjadi merupakan pertentangan penguasaan berdasarkan klaim tanah garapan atau kebun lama masyarakat dan perluasan tanah garapan baru.
- 3 tahun terakhir masyarakat di sekitar TNLL sudah mau terlibat dalam pengelolaan hutan melalui skema-skema perhutanan social. TNLL yang dulunya sangat eksklusif, saat ini sudah berubah dan telah melakukan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Selain itu UPT TNLL sudah menghormati Hukum Adat yang dibuktikan dengan mengedepankan penerapan hukum adat ketika terjadi pelanggaran adat pada zona-zona dalam wilayah adat yang berada di dalam TNLL
- Dalam konsep masyarakat hukum adat Marena dan masyarakat hukum adat lainnya di sekitar TNLL, hutan merupakan milik bersama. Pada tempat-tempat tertentu di dalam hutan adat

(Huaka) yang berdasarkan hukum adat ditetapkan sebagai Wana dan Wanangkiki yang wajib dilindungi dan dijaga. Hal ini memiliki kesesuaian dengan konsep pengelolaan Kawasan Konservasi pada taman nasional pada Zona Rimba dan Zona Inti. Oleh karena itu rezonasi TNLL merupakan langkah baik dalam mengakomodir posisi huaka-huaka sebagaimana diatur oleh hukum adat masyarakat setempat, dan kedepannya harus di tindak lanjuti dengan pengelolaan bersama. Sebagian besar responden beranggapan bahwa rezonasi yang ada saat ini belum terinformasikan dan tersosialisasikan dengan baik, sehingga sebagian pihak masih merasa belum terjadi perubahan apa-apa terkait dengan tumpang tindih wilayah adatnya dengan kawasan TNLL.

- Untuk meminimalisir konflik dalam kawasan konservasi sebaiknya ada kerjasama para pihak untuk pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. KPH sebagai pemangku kawasan hutan di luar kawasan konservasi sudah seharusnya dilibatkan. Intensifikasi pemberdayaan di luar kawasan hutan patut untuk dicoba sehingga mengurangi aktifitas masyarakat di dalam kawasan hutan. Contohnya pemberdayaan peternakan, perikanan, dan UMKM

5.6. Catatan Studi Lapangan di Taman Nasional Bukit Duabelas

- TNBD merupakan suatu kawasan konservasi yang cukup unik dan berbeda secara karakteristik dengan Taman nasional lainnya yang ada di Indonesia. Biasanya keberadaan Taman Nasional di peruntukkan untuk melindungi habitat, keanekaragaman hayati, dan ekosistem tertentu. keberadaan TNBD khusus untuk melindungi ruang penghidupan Orang Rimba atau Suku Anak Dalam atau Suku Kubu. Dalam konteks ini, penyebutan Suku Anak Dalam diharapkan lebih relevan.
- Konflik tenurial yang terjadi di TNBD dapat dikualifikasi kan dalam 4 bentuk, yakni: Pertama, konflik akibat adanya kebun masyarakat desa (orang melayu lokal di luar Suku Anak Dalam) yang secara turun temurun dikelola masyarakat masuk kedalam kawasan TNBD. Kedua, yaitu konflik akibat dari ekspansi kebun masyarakat desa (desa transmigrasi) ke dalam kawasan TNBD melalui metode jual beli dengan Suku Anak Dalam dan Pembukaan bersama dengan Suku Anak Dalam. Ketiga, konflik yang terjadi akibat dari model pemanfaatan tanah untuk kebun oleh Suku Anak Dalam yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi seperti membuka lahan dengan cara dibakar. Dan keempat, konflik yang terjadi akibat maraknya ilegal logging sejak pandemi Covid 19, yang dilakukan masyarakat di bagian utara TNBD.
- Rezonasi yang dilakukan TNBD atau yang dikenal sebagai menyatukan hukum adat Suku Anak Dalam dengan hukum negara mencoba mengakomodir ruang-ruang pemanfaatan hutan oleh masyarakat baik oleh Suku Anak Dalam maupun oleh masyarakat desa sekitar. Secara kuantitas lebih kurang 78% kawasan TNBD merupakan zona tradisional yang selanjutnya dibagi kedalam Zona tradisional Suku Anak Dalam dan Zona Tradisional Masyarakat Desa.
- Gap kebudayaan dan asimilasi sosial antara Suku Anak Dalam dan masyarakat desa sekitar menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan TNBD. Barang-barang tertentu seperti sepeda motor, telepon genggam dan uang tunai menjadi pemicu bagi Suku Anak Dalam yang dengan mudahnya memberikan lahan/kebun yang baru mereka buka kepada masyarakat desa sekitarnya untuk diganti dengan barang-barang tersebut.

6. Pembelajaran

Beberapa pembelajaran yang diperoleh, termasuk:

Penanganan konflik tenurial

- Informasi dasar dalam resolusi konflik sangat penting. kesalahan informasi dasar dapat berakibat pada tidak terselesaikannya konflik di lapangan. Dalam konteks ini, informasi yang setara dan merata menjadi kunci dalam proses resolusi konflik.
- Ketepatan dan kejelasan pesan dalam menyajikan informasi terkait dengan resolusi konflik menjadi salah satu factor penentu dalam menyelesaikan konflik dilapangan
- Dalam resolusi konflik, memetakan actor sangat penting mengingat proses resolusi belum tentu terjadi di ruang pertemuan saja, bisa jadi resolusi terjadi akibat peran actor yang tidak disangka-sangka.
- Situasi politik local juga sangat menentukan proses percepatan resolusi konflik tenurial di lapangan.
- Komunikasi para pihak penting disertai dengan gaya atau corak komunikasi non formal.
- Tindakan kalaboratif dan kerja-kerja bersama antara para pihak perlu didorong dan dilakukan secara konsisten
- Resolusi konflik mesti didukung dengan momentum yang tepat
- Fungsi-fungsi fasilitasi penting dilakukan untuk meresolusi konflik
- Menyatukan kepentingan dalam satu gerakan bersama menjadi tantangan utama dalam proses resolusi konflik
- Kegiatan patroli kawasan sebagai upaya penegakan hukum tidak bisa dilakukan sendiri oleh pihak Balai, penting mensinergikannya dengan masyarakat di sekitar zona penyangga
- Pengetahuan tentang wilayah dan karakter masyarakat sangat penting bagi para pihak untuk melakukan kegiatan di sekitar Taman Nasional

Partisipasi rezoning

- Dalam konteks rezonasi partisipatif, maka penting mendapatkan informasi dasar tentang etnografi masyarakat adat / local
- Penting mengidentifikasi pola pengaturan dan sistem hak tenure secara spesifik pada zona-zona tertentu di kawasan TN yang sesuai pengaturan hukum adat yang berlaku
- Penting pula identifikasi mengenai penguasaan lahan penting untuk dipelajari dan di diskusikan bersama masyarakat. Baik masyarakat adat maupun bukan (transmigrasi)
- Perlu melakukan Identifikasi model-model pemanfaatan lahan atau kawasan untuk memetakan sejauh mana gap antara model pemanfaatan yang diperoleh menurut hukum negara dan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokalnya, dan diharapkan kedepan dapat menjadi acuan dalam poin2 negosiasi (resolusi konflik) untuk pengelolaan hutan lestari dalam kawasan yang memiliki fungsi konservasi

7. Rencana Tindak Lanjut

- Sepanjang Januari 2021, akan dilakukan:
1. **Transkripsi hasil wawancara lapangan.** Proses transkripsi adalah proses memindahkan rekaman suara ke dalam bentuk teks. Transkripsi menjadi penting dalam proses penulisan karena penulis yang sekaligus melakukan riset di lapangan akan memanggil kembali semua memori yang pernah di dapatkan selama masa studi lapangan. Dengan itu, proses penulisan diharap menjadi lebih lancar.
 2. **Diskusi internal tim penulis** untuk kelanjutan proses penulisan. Dalam diskusi diharapkan Tim Penulis sudah mendapatkan: a) poin pembelajaran terkait Resolusi Konflik Tenurial dan Rezonasi Partisipatif, b) identifikasi praktik baik di masing-masing lokasi, c) langkah-langkah teknis untuk resolusi konflik tenurial dan rezonasi partisipatif (rencana pengembangan dokumen 3 dan dokumen 4), d)

3. **Konsultasi dengan USAID BIJAK.** Dalam konsultasi, beberapa poin yang perlu dikonsultasikan adalah: a) hasil-hasil poin pembelajaran, b) bentuk atau gaya bahasa dalam penulisan, c) draf storyboard untuk film TNGR, d) jadwal, dan e) lainnya.
4. **Penulisan draf dokumen 1 dan dokumen 2** berbasis outline yang telah disusun sebelumnya

8. Lampiran

1. TOR sebagai panduan studi di lapangan
2. Workplan
3. Daftar Referensi (sementara)